



---

---

## TINJAUAN ETIKA WARGA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF NILAI PANCASILA

Febriyanti Iis Setyowati<sup>1)\*</sup>, Aisyah Mutiara Audina Aisyi<sup>2)</sup>, Nur Aura Amaliah<sup>3)</sup>,  
Nadiesha Fulvia Azura<sup>4)</sup>, Salsabilla Nadhifa Basir<sup>5)</sup>, Shofi Nur Aini<sup>6)</sup>, Anang Dony Irawan<sup>7)</sup>

<sup>123456</sup>Universitas Muhammadiyah Surabaya  
E-mail: fy908464@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku komunikasi netizen Indonesia di media sosial dalam merespons isu kenaikan harga kebutuhan pokok dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mengkaji perilaku tersebut dalam perspektif nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika warga negara digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk implementasi etika warga digital berbasis Pancasila dalam interaksi netizen di ruang digital. Perkembangan media sosial sebagai ruang publik digital telah mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan opini terhadap berbagai kebijakan publik, namun tidak selalu diiringi dengan kesadaran etika dalam berkomunikasi. Hal ini terlihat dari masih maraknya komentar yang mengandung ujaran kebencian, provokasi, serta sikap tidak menghargai pendapat orang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi komparatif terhadap komentar netizen pada unggahan media sosial Instagram yang berkaitan dengan kedua isu tersebut. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan mengambil komentar yang relevan dalam kurun waktu tertentu. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan pola perilaku netizen serta mengidentifikasi sejauh mana perilaku tersebut mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan etika warga negara digital guna menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat persatuan bangsa di era digital.

**Kata Kunci:** Etika; Pancasila; Media Sosial

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the communication behavior of Indonesian netizens on social media in responding to issues of rising basic commodity prices and the Free Nutritious Meal (MBG) program, as well as to examine such behavior from the perspective of Pancasila values as the foundation of digital citizenship ethics. In addition, this study also seeks to identify the forms of implementation of Pancasila-based digital citizenship ethics in netizen interactions within the digital space. The development of social media as a digital public sphere has increased public participation in expressing opinions on various public policies; however, this is not always accompanied by ethical awareness in communication. This condition is reflected in the persistence of comments containing hate speech, provocation, and a lack of respect for differing opinions. This study employs a qualitative approach using a comparative content analysis method to examine netizen comments on Instagram posts related to the selected issues. Data were collected through documentation techniques by selecting relevant comments within a specific period. The findings are expected to reveal patterns of netizen behavior and to identify the extent to which such behavior reflects the values in Pancasila. Therefore, this study is expected to contribute to strengthening digital citizenship ethics in order to maintain social harmony and reinforce national unity in the digital era.*

**Keywords:** Ethics; Pancasila; Social Media.



## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, khususnya melalui penggunaan media sosial sebagai ruang publik digital. Media sosial memungkinkan individu untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, serta berpartisipasi dalam berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik secara terbuka. Tingginya intensitas penggunaan media sosial di Indonesia menjadikan platform ini sebagai sarana utama dalam pembentukan opini publik. Namun demikian, kebebasan berekspresi tersebut tidak selalu diiringi dengan kesadaran etika dalam berkomunikasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak disertai etika dapat menimbulkan permasalahan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta konflik antar pengguna, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan sosial di masyarakat (Maura et al., 2024).

Salah satu isu yang banyak mendapat perhatian publik di media sosial adalah kenaikan harga kebutuhan pokok yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Isu ini sering memicu berbagai respons dari netizen, mulai dari kritik konstruktif hingga komentar yang bersifat emosional dan provokatif. Di sisi lain, kebijakan pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi topik yang ramai diperbincangkan di media sosial, terutama terkait implementasi dan dampaknya bagi masyarakat. Respons netizen terhadap kedua isu tersebut menunjukkan adanya dinamika perilaku yang beragam, yang tidak hanya mencerminkan pandangan masyarakat terhadap kebijakan publik, tetapi juga memperlihatkan kualitas etika komunikasi di ruang digital. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku netizen Indonesia di media sosial masih cenderung belum sepenuhnya mencerminkan etika komunikasi yang baik, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam kajian akademik (Farhan, 2023).

Dalam perspektif kewarganegaraan, perilaku netizen di media sosial dapat dikaji melalui konsep etika warga negara digital (*digital citizenship*), yaitu norma dan nilai yang mengatur perilaku individu dalam berinteraksi di ruang digital. Etika ini menekankan pentingnya tanggung jawab, kesopanan, serta penghargaan terhadap orang lain dalam setiap bentuk komunikasi. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia (Irawan & Prasetyo, 2022), khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa masih banyak pengguna media sosial yang belum menerapkan etika komunikasi secara optimal, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif dalam interaksi sosial (Pratiwi & Rianto, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku komunikasi netizen Indonesia dalam merespons isu kenaikan harga kebutuhan pokok dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial, serta mengkaji perilaku tersebut dalam perspektif nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika warga negara digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk implementasi etika warga digital berbasis Pancasila dalam interaksi netizen di ruang digital.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) (Haryoko et al., 2020). Metode ini digunakan untuk menganalisis makna yang terkandung dalam teks, termasuk komentar netizen di media sosial, secara sistematis dan objektif. Analisis isi merupakan teknik penelitian yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta makna komunikasi dalam suatu pesan atau media.



Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dari data berbentuk teks dengan mempertimbangkan konteks penggunaannya (Susanto et al., 2022). Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena perilaku netizen secara mendalam berdasarkan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Metode kualitatif menekankan pada pemaknaan, interpretasi, serta pengalaman subjektif individu dalam suatu fenomena sosial (Arafat, 2019). Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengambil komentar netizen pada unggahan media sosial Instagram yang berkaitan dengan isu kenaikan harga kebutuhan pokok dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kurun waktu tertentu. Komentar yang dipilih merupakan komentar yang relevan dengan topik penelitian serta memiliki variasi bentuk respons. Tahap berikutnya, teknik analisis data dilakukan dengan cara membaca, mengidentifikasi, dan menginterpretasikan komentar netizen berdasarkan indikator etika komunikasi digital yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila, seperti penggunaan bahasa yang santun, penyampaian informasi yang jujur, serta sikap menghargai pendapat orang lain. validitas data dijaga melalui pengecekan ulang (cross-check) serta perbandingan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Etika Warga Digital dalam Perspektif Nilai Pancasila pada Isu MBG dan Kenaikan Harga**

Isu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kenaikan harga kebutuhan pokok merupakan dua fenomena sosial yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, sehingga memicu tingginya intensitas diskusi di media sosial. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang publik digital yang membentuk opini masyarakat secara luas, di mana menurut (Bustami et al., 2024) interaksi di ruang digital sering kali berlangsung cepat namun kurang reflektif. Tingginya partisipasi netizen dalam merespons kedua isu tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan publik, namun di sisi lain juga memperlihatkan adanya tantangan dalam menjaga etika komunikasi digital. Banyaknya komentar yang bersifat emosional, provokatif, dan tidak berbasis data menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial belum sepenuhnya diimbangi dengan tanggung jawab moral sebagai warga negara digital.

Dalam perspektif Pancasila, etika warga digital tidak dapat dilepaskan dari nilai moral yang terkandung dalam setiap silanya. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk bersikap jujur dan tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan, yang menurut (Revalin & Penuh, 2025) menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah disinformasi di media sosial. Dalam konteks isu MBG dan kenaikan harga, penyebaran informasi yang tidak valid atau dilebih-lebihkan dapat menimbulkan kepanikan publik serta memperburuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam komunikasi digital merupakan bentuk implementasi nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya sikap empati, penghargaan terhadap sesama, serta penggunaan bahasa yang santun dalam berkomunikasi. Dalam realitasnya, banyak komentar netizen yang masih mengandung unsur merendahkan, menyindir, bahkan menyalahkan pihak tertentu tanpa dasar yang jelas, yang



menurut (Hamama, 2024) mencerminkan rendahnya etika komunikasi digital di kalangan pengguna media sosial. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam komunikasi digital. Padahal, dalam konteks isu kenaikan harga, masyarakat yang terdampak membutuhkan empati dan pemahaman, bukan justru komentar yang memperkeruh suasana.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks interaksi digital, karena perbedaan pendapat terkait efektivitas program MBG maupun kebijakan ekonomi merupakan hal yang wajar dalam masyarakat demokratis. Namun, dalam praktiknya, banyak komentar yang justru memperuncing perbedaan dan memicu perdebatan yang tidak sehat, yang menurut (Hardian et al., 2025) dapat melemahkan kohesi sosial di ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa nilai persatuan belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku netizen. Padahal, media sosial seharusnya dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial, bukan sebaliknya menjadi ruang yang memperbesar perpecahan.

Sila keempat menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus disertai dengan kebijaksanaan, sehingga setiap opini yang disampaikan perlu didasarkan pada pertimbangan rasional dan data yang valid. Dalam konteks ini, (Bustami et al., 2024) menjelaskan bahwa komunikasi digital yang sehat ditandai dengan kemampuan individu dalam menyampaikan argumen secara logis dan tidak provokatif. Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa banyak netizen lebih mengedepankan emosi dibandingkan rasionalitas dalam menyampaikan pendapat. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik demokrasi digital di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas diskursus publik.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berkaitan dengan pentingnya akses terhadap informasi yang adil dan tidak bias. Dalam isu MBG dan kenaikan harga, informasi yang tidak akurat dapat menciptakan persepsi yang keliru di masyarakat, yang menurut (Revalin & Penuh, 2025) berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, netizen memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga sebagai penyebar informasi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai landasan etika dalam membentuk perilaku warga digital yang lebih bijak.

## **Implementasi Etika Warga Digital Berbasis Pancasila dalam Respons Netizen terhadap MBG dan Kenaikan Harga**

Dalam praktiknya, respons netizen terhadap isu MBG dan kenaikan harga menunjukkan dinamika yang kompleks, di mana media sosial menjadi sarana partisipasi publik sekaligus ruang yang rentan terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Fenomena ini, menurut (Revalin & Penuh, 2025), menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan agar mampu menyaring informasi serta berkomunikasi secara lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, implementasi etika warga digital berbasis Pancasila menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas interaksi di ruang digital.

Salah satu langkah utama dalam mengimplementasikan etika tersebut adalah melalui peningkatan literasi digital, di mana netizen perlu memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Dalam konteks ini, Hamama (2024) menekankan bahwa literasi digital berperan penting dalam membentuk perilaku komunikasi yang lebih etis dan bertanggung jawab. Informasi yang tidak akurat terkait MBG dan kenaikan harga dapat memicu kesalahpahaman serta memperburuk kondisi sosial, sehingga kemampuan dalam memilah informasi menjadi sangat krusial dalam menjaga kualitas komunikasi digital.



Implementasi etika digital juga dapat dilakukan melalui pembiasaan penggunaan bahasa yang santun dan konstruktif dalam menyampaikan pendapat. Dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik, netizen perlu mengedepankan argumentasi yang rasional dan berbasis data, yang menurut (Bustami et al., 2024) merupakan indikator utama komunikasi digital yang sehat. Hal ini mencerminkan penerapan nilai kebijaksanaan dalam sila keempat Pancasila, di mana kebebasan berpendapat harus disertai dengan tanggung jawab sosial.

Sikap empati dan kepedulian sosial juga menjadi aspek penting dalam etika warga digital, terutama dalam merespons isu kenaikan harga yang berdampak langsung pada masyarakat. Dalam hal ini, (Hardian et al., 2025) menyatakan bahwa empati dan solidaritas sosial merupakan bagian dari implementasi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila. Oleh karena itu, *netizen* diharapkan mampu menyampaikan pendapat dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain serta menghindari komentar yang bersifat merendahkan atau memicu konflik.

Peran berbagai pihak juga sangat penting dalam mendukung implementasi etika ini. Pemerintah perlu menyediakan informasi yang transparan dan akurat terkait kebijakan publik, sementara lembaga pendidikan berperan dalam menanamkan nilai-nilai etika digital melalui pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, masyarakat sipil juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran publik melalui edukasi literasi digital, yang menurut (Revalin & Penuh, 2025) menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem komunikasi digital yang sehat. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, ruang digital diharapkan dapat menjadi sarana diskusi publik yang lebih konstruktif.

Pada akhirnya, implementasi etika warga digital berbasis Pancasila bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Dalam hal ini, (Bustami et al., 2024) menegaskan bahwa penguatan etika digital merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas sosial di era digital. Melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap interaksi digital, netizen diharapkan mampu menciptakan komunikasi yang lebih santun, bertanggung jawab, serta berkontribusi terhadap persatuan bangsa.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perilaku komunikasi netizen Indonesia dalam merespons isu kenaikan harga kebutuhan pokok dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial masih didominasi oleh komentar yang tidak etis, baik dalam bentuk penyampaian opini tanpa dasar yang jelas, penggunaan bahasa yang tidak santun, maupun respons yang bersifat emosional dan sarkastik. Pada isu kenaikan harga, komentar netizen cenderung bersifat argumentatif namun disertai prasangka terhadap pihak tertentu, sedangkan pada isu MBG lebih didominasi oleh respons yang personal dan emosional. Jika ditinjau dari perspektif nilai-nilai Pancasila, perilaku tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta prinsip kebijaksanaan dalam berpendapat dan keadilan sosial. Meskipun demikian, terdapat pula sebagian komentar yang menunjukkan sikap etis, seperti penyampaian pendapat yang rasional, konstruktif, dan empatik. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik isu turut memengaruhi pola komunikasi netizen, sekaligus menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika warga digital masih perlu diperkuat melalui peningkatan literasi digital dan pembiasaan komunikasi yang santun, sehingga media sosial dapat berfungsi sebagai ruang publik yang sehat, konstruktif, dan mendukung keharmonisan serta persatuan bangsa di era digital.



---

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, G. Y. (2019). Membongkar isi pesan dan media dengan content analysis. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 32. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2370>
- Bustami, I. R. S., Harahap, A., & Nasution, M. (2024). Etika komunikasi media digital di era post-truth. *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, 5(1), 39–53.
- Irawan, Anang. Dony. , & Prasetyo, B. (2022). Pancasila sebagai politik hukum kebangsaan. *Urnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 9(1), 1–7. <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>
- Farhan, A. (2023). Etika dan perilaku masyarakat indonesia dalam menggunakan media sosial. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 139–145. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24497>
- Hamama, S. (2024). Etika komunikasi dalam media sosial: Tantangan dan solusinya. *Jurnal Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah*, 4(2), 182–197. <https://doi.org/10.33507/selasar.v4i2.2608>
- Hardian, F., Nursyamsi, Sari. E., & Rahmandani, S. (2025). Etika dan tanggung jawab pengguna media sosial di era komunikasi digital. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Maura, T., Ramadhanti, S., Kaban, A., Permata, D., Putri, S. M., Ramadhadi, M. R., & Harahap, N. (2024). Etika komunikasi dalam bemmedia sosial bagi gen z. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2985(8), 252–259. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Pratiwi, K. E. L. P., & Rianto, P. R. (2023). Etika komunikasi dalam bermedia sosial di kalangan siswa sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Kudus. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 3(1). <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol3.iss1.art2>
- Haryoko, S., Bahartiar, & Fajar A. (2020). *Analisis data penelitian kualitatif (konsep, teknik, & prosedur analisis)*.
- Revalin, A., & Penuh, S. (2025). Perubahan norma etika dalam hubungan sosial di platform media sosial. *Jurnal Komunikasi*, 3(6), 223–231.
- Susanto, C., Leonora, H., & Meiden, C. (2022). Content analysis method: Analisis prinsip isi dan prinsip kualitas laporan keberlanjutan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 619. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.650>